



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
**UNIT KERJA** : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : TRIANDINI OSCAR
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
3. NHK : 754154

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 3.490.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 339 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 942 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 333 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 303 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 304 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 352 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 313 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
8. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
9. Tanah Seluas 312 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 110.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 11.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.833.595
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.613.833.595
III. HUTANG	Rp.	157.928.097
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.455.905.498

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.